

MODEL PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI TINGKAT AKAR RUMPUT (STUDI PERAN JRMK DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG KOTA DI JAKARTA TAHUN 2017-2022)

Dekki Mahroza¹

¹Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Nasional
Dekki.mahroza@gmail.com

(Submission 14-03-2023, Revisions 20-03-2023, Accepted 27-03-2023.)

Abstract

After the fall of the Orde Baru regime, Indonesia entered a transitional phase of democracy, one of which was marked by the holding national and regional elections. However, the ongoing development of democracy experienced setbacks. One form of setbacks is electoral democracy that dominated by oligarchs. The oligarchs are supported by a capitalistic economic system and a corrupt political culture such as the practice of money politics which spreads during the implementation of electoral democracy. Because of this, a model for development democracy must be built that can prevent the public from being tempted by money politics and open up wide participation of the public in elections. Urban village development by JRMK also reflected democracy development, starting from the involvement of citizens and JRMK in the 2017 DKI Jakarta governor election through a political contract with one of the governor candidates, namely Anies Baswedan, to the process of formulating village development policies involving the role of the public. This research examines the role of a community organization, namely the City Poor People's Network (JRMK) in the development of urban villages in Jakarta in 2017-2022 by looking at it from the perspective of democracy development. This aspect of democracy can be seen starting from JRMK's role in encouraging residents to be actively involved in the moment of the 2017 DKI Jakarta gubernatorial election to encouraging citizen participation in the village development process, be it physical village development such as settlements, village roads, sanitation, as well as human development both from a political perspective, economic, and socio-cultural.

Keywords: *democracy developmen; urban village development; JRMK.*

Abstrak

Setelah kejatuhan rezim Orde Baru, Indonesia memasuki tahap transisi demokrasi yang salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Namun pembangunan demokrasi yang berjalan mengalami kemunduran. Bentuk kemundurannya antara lain adalah demokrasi elektoral yang dikuasai kelompok oligarki. Kaum oligarki didukung oleh sistem ekonomi kapitalistik dan budaya politik korup seperti praktek politik uang yang merebak pada saat pelaksanaan demokrasi elektoral. Karena itu harus dibangun model pembangunan demokrasi yang dapat menghindari masyarakat dari godaan politik uang dan membuka luas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pembangunan kampung oleh JRMK juga mencerminkan pembangunan demokrasi, yang dimulai dari keterlibatan warga dan JRMK dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 melalui kontrak politik dengan salah satu calon gubernur yakni Anies Baswedan hingga proses perumusan kebijakan pembangunan kampung yang melibatkan peran warga. Penelitian ini mengkaji mengenai peran suatu organisasi komunitas yakni Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam pembangunan kampung kota di Jakarta tahun 2017-2022 dengan melihatnya dalam perspektif pembangunan demokrasi. Aspek demokrasi ini bisa dilihat dimulai dari peran JRMK dalam mendorong warga terlibat aktif dalam momen pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 hingga mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan kampung, baik itu pembangunan fisik kampung seperti pemukiman, jalan kampung, sanitasi, maupun pembangunan manusianya baik dari sisi politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Kata Kunci: pembangunan demokrasi; pembangunan kampung kota; JRMK.

PENDAHULUAN

Setelah gerakan reformasi tahun 1998 yang menumbangkan rezim Soeharto, Indonesia memasuki tahap transisi demokrasi. Selama hampir 25 tahun, Indonesia melakukan pembangunan demokrasi yang ditandai dengan terjadinya beberapa perubahan seperti penyelenggaraan pemilu

nasional yang rutin dijalankan lima tahun sekali, reformasi lembaga negara dengan menghapus Fraksi ABRI di MPR, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), dan pembatasan masa jabatan presiden. Namun proses pembangunan demokrasi bukanlah suatu pola pembangunan yang selalu berjalan maju, akan selalu ada berbagai kekuatan sosial-politik yang saling tarik-menarik membawa proses pembangunan demokrasi ini berjalan maju atau menariknya mundur. Atau, dengan kata lain bisa disebutkan bahwa pembangunan demokrasi bisa mengalami kemunduran.

Bentuk kemundurannya antara lain adalah demokrasi elektoral yang dikuasai kelompok oligarki. Kaum oligarki didukung oleh sistem ekonomi kapitalistik dan budaya politik korup seperti praktek politik uang yang merebak pada saat pelaksanaan demokrasi elektoral. Karena itu harus dibangun model pembangunan demokrasi yang dapat menghindari masyarakat dari godaan politik uang dan membuka luas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pembangunan demokrasi atau proses demokratisasi dalam suatu negara menyangkut dua aspek yakni: *Pertama*, aspek struktural, yaitu perubahan ke arah rezim yang demokratis yang ditandai dengan adanya reformasi pada sistem ketatanegaraan. *Kedua*, aspek kultural, yaitu adanya restrukturisasi pada masyarakat sipil yang ditandai dengan terinternalisasinya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat (Held, 2007 : 323).

Menurut Prof. Maswadi Rauf, pembangunan demokrasi adalah membangun sebuah sistem politik yang demokratis dimana suara rakyat menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan rakyat menikmati kebebasan, termasuk kebebasan dalam menjalankan pengawasan kepada pemerintah. Selain itu, pembangunan politik dan demokrasi juga menyangkut tertanamnya budaya politik yang demokratis, dimana nilai-nilai egaliter, kebebasan, solidaritas sosial, kerakyatan, hidup di tengah-tengah masyarakat (Munandar, 1994 : 227-228). Proses pembangunan demokrasi adalah proses pembangunan yang fluktuatif yang bisa kembali berjalan mundur mengarah ke masa otoritarian (Huntington, 1995).

Proses pembangunan demokrasi bisa mundur karena prosedur demokrasi yang berjalan di masa transisi dibajak oleh kekuatan-kekuatan ekonomi politik bermodal besar yang dikenal dengan istilah oligarki. Oligarki menurut Winters adalah para elite ekonomi atau politisi yang menjadi kaya melalui jalur korupsi dan terlibat dalam kehidupan politik untuk mempertahankan kekayaannya (Winter, 2011 : 1,6). Berbagai instrumen digunakan oleh oligarki untuk mempertahankan kekayaan ekonomi dan posisinya sebagai elite politik. Salah satu instrumennya adalah politik uang, yang terutama dilakukan pada saat pemilu berlangsung. Praktek politik uang juga ditopang oleh budaya patron-klien, yakni suatu pola hubungan yang berdasarkan pada transaksi sumber daya yang saling menguntungkan. Patron memiliki sumber daya cukup besar, seperti perlindungan, fasilitas, kedudukan, lisensi, dana, dan lainnya. Sedangkan klien menyediakan dukungan, dan tenaga (baik yang berupa keahlian maupun tenaga kasar seperti jasa keamanan) (Gaffar, 1991). Oligarki tumbuh dalam praktek pembangunan ekonomi yang timpang yang berdampak pada kesenjangan sosial yang tinggi, karena itu para oligark akan berupaya mempertahankan sistem ekonomi yang telah menguntungkan mereka.

Pembangunan demokrasi dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Bagi Robert Dahl, demokrasi yang ideal terdiri dari empat prinsip, yakni kebebasan politik, keadilan politik, kebebasan ekonomi, dan keadilan ekonomi. Jika pembangunan demokrasi mengabaikan prinsip keadilan ekonomi maka akan menghasilkan demokrasi yang pincang dimana kelompok ekonomi lemah harus bersaing dengan kelompok ekonomi kuat dengan semangat kompetisi bebas. Adanya ketimpangan dari sisi keadilan ekonomi menggerus prinsip keadilan politik karena elite ekonomi mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi menjadi sumber-sumber politik. Karena itu harus ada orde ekonomi yang menjamin prinsip keadilan ekonomi terpenuhi agar pembangunan demokrasi menjadi komprehensif (Dahl, 1992 : 58). Menurut Larry Diamond, pembangunan ekonomi yang berkeadilan akan memperluas kelas menengah dan meningkatkan taraf pendidikan dan informasi di antara masyarakat. Ketika suatu negara telah mencapai taraf pembangunan dan pendapatan pada level menengah, maka ketidakadilan cenderung menurun yang akan mengurangi ketimpangan sosial dan polarisasi politik antar kelompok (Diamond, 2010).

Meningkatnya kelas menengah dengan kapasitas pendidikan yang lebih tinggi serta menurunnya angka kesenjangan sosial akan memperluas akses masyarakat berpartisipasi dalam politik. Meningkatkan partisipasi masyarakat perlu karena dalam masa pelaksanaan demokrasi prosedural di dalamnya selalu melekat *deficit democracy*. Karena keputusan-keputusan strategis pada

dasarnya adalah negosiasi yang dimonopoli oleh elite. Karena itulah diperlukan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat untuk memberikan perubahan politik ke arah demokrasi yang substansial (Thamrin, 2017). Dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat miskin, terdapat tiga prinsip implementasi partisipasi politik masyarakat miskin, yaitu:

- 1) Berorientasi pada permasalahan praktis. Partisipasi politik masyarakat miskin difokuskan kepada problem keseharian masyarakat atau yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat seperti isu tempat tinggal, lapangan pekerjaan, kebersihan lingkungan, pelayanan publik, dan lain sebagainya.
- 2) Partisipasi *bottom-up*. Partisipasi politik masyarakat miskin berarti menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan terutama yang berhubungan dengan kehidupan sosialnya langsung.
- 3) Mencari solusi melalui musyawarah. Dalam pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah sesama anggota masyarakat menghargai posisi satu sama lain dan menghasilkan solusi secara bersama (Fung dan wright, 2001).

Meningkatkan partisipasi masyarakat miskin berarti melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin, dimana kerja-kerja pemberdayaan adalah ciri khas dari organisasi *civil society* (Rusli, 2012). Gerakan *civil society* melalui pemberdayaan masyarakat miskin menurut AS Hikam adalah gerakan arus bawah demokratisasi dimana gerakan ini ditujukan untuk melakukan pengembangan kemandirian politik masyarakat yang direfleksikan dalam seluruh ruang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya (Hikam, 1996 : 123-124).

Penelitian ini mengkaji mengenai peran suatu organisasi komunitas yakni Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam pembangunan kampung kota di Jakarta tahun 2017-2022 dengan melihatnya dalam perspektif pembangunan demokrasi. Aspek demokrasi ini bisa dilihat dimulai dari peran JRMK dalam mendorong warga terlibat aktif dalam momen pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 hingga mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan kampung, baik itu pembanguana fisik kampung seperti pemukiman, jalan kampung, sanitasi, maupun pembangunan manusianya baik dari sisi politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dimana data-data tersebut diperoleh antara lain melalui ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau organisasi-organisasi (subyek) itu sendiri. Sifat penelitian kualitatif adalah deskriptif, yaitu penggambaran secara mendalam tentang situasi, atau proses yang diteliti (Moleong, 1986 : 6). Tujuan metode penelitian kualitatif menurut Nazir adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1998 : 63).

Tema dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai hubungan pembangunan kampung kota dengan pembangunan demokrasi. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran deskriptif dan sistematis mengenai peran JRMK dalam membangun kampung kota di Jakarta pada periode tahun 2017-2022, kemudian menganalisa peran pembangunan kampung kota dengan teori-teori demokrasi dan korelasinya terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

- a) Data primer, bersumber dari wawancara dengan pengurus JRMK. Dalam penelitian ini penulis menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang meliputi pengurus inti JRMK, baik itu dari koordinator, wakil koordinator, mantan koordinator, maupun ketua jaringan. Selain itu penulis juga menggunakan teknik *snowball* atau pengambilan narasumber berantai, di mana narasumber yang ada memberikan rujukan untuk merekrut narasumber baru yang diperlukan untuk studi penelitian.
- b) Data sekunder, bersumber dari studi kepustakaan baik itu dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan sumber berita online.

Wawancara penulis dilakukan dari tanggal 4 Juli 2022 – 13 Agustus 2022 dengan 4 narasumber yaitu:

- a. Wawancara dengan Eny Rochayati (Koordinator JRMK 2012-2018) tanggal 4 Juli 2022
- b. Wawancara dengan Sukariawati, tanggal 20 Juli 2022
- c. Wawancara dengan Minawati (Koordinator JRMK 2021-2024) tanggal 17 Juni 2022
- d. Wawancara dengan Pak Idim (Koordinator SEBAJA) tanggal 13 Agustus 2022

PEMBAHASAN

• Kemunduran Demokrasi di Indonesia

Pembangunan demokrasi di suatu negara bisa dilihat dari kualitas pelaksanaan pemilunya. Untuk konteks Indonesia bisa dinilai dari proses dan hasil pelaksanaan pemilunya, dimana proses pemilu selalu diwarnai oleh praktek politik uang dan berdampak pada hasil pemilu yang didominasi oleh elite bermodal besar yang dikenal dengan istilah oligarki. Kelompok oligarki ini menyebar ke berbagai institusi politik, sosial, dan budaya. Kemudian menjadi kelompok yang paling menikmati sistem demokrasi elektoral saat ini (Harris, 2014). Dari fenomena ini, bisa dinilai bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia sedang berjalan mundur. Praktek politik uang umumnya menyebar di tengah-tengah masyarakat miskin, termasuk juga dalam komunitas masyarakat kampung kota. Masyarakat miskin rentan menjadi sasaran politik uang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

- 1) Faktor keterbatasan ekonomi.
- 2) Faktor rendahnya tingkat pendidikan.
- 3) Faktor lemahnya pengawasan (Fitriani, Karyadi, Chaniago, 2019).

Dari tiga faktor di atas, faktor kedua dan ketiga tetap memiliki hubungan dengan faktor kemiskinan. Rendahnya tingkat pendidikan terkait dengan rendahnya pendapatan ekonomi yang membuat masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk mengakses tingkat pendidikan yang lebih baik. Sedangkan rendahnya pengawasan berkaitan dengan rendahnya pendidikan yang kemudian berpengaruh kepada pola pikir masyarakat, sehingga belum mampu memahami dengan baik terkait peraturan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya praktek politik uang.

Realitas kemiskinan di Indonesia tidak terlepas dari dampak kebijakan pembangunan ekonomi yang timpang. Keberadaan kampung kota yang kadang diasosiasikan dengan pemukiman kumuh adalah buah dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Urbanisasi sebagai dampak dari kemiskinan dan kelangkaan lapangan kerja di pedesaan mendorong warga desa mencari kerja di kota-kota sebagai buruh atau pekerja informal dengan pendapatan yang minim. Mahalnya harga properti di kota-kota besar sebagai konsekuensi massifnya pembangunan di perkotaan, adalah beberapa faktor yang turut mendorong keberadaan kampung kumuh.

Liberalisasi ekonomi yang mulai diterapkan pada dekade 80-an dan semakin massif di era reformasi menghasilkan realitas kelas ekonomi yang kontradiktif antara sektor formal/modern dengan sektor non-formal/tradisional. Masyarakat miskin kota yang terkonsentrasi dalam kampung kumuh adalah entitas sosial yang tidak terserap dalam pola pembangunan yang liberal dan berorientasi pada pertumbuhan. Pertumbuhan mensyaratkan adanya investasi besar dan penguasaan teknologi maju untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi (Arief, 1978 : 5), suatu persyaratan yang tidak dimiliki kelompok miskin karena keterbatasan modal dan rendahnya tingkat pendidikan.

Karena itu, sebagaimana dikatakan Dahl bahwa pembangunan demokrasi yang ideal tidak mungkin diwujudkan tanpa membangun sistem ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan demokrasi dalam konteks meningkatkan partisipasi masyarakat miskin haruslah menyertakan alternatif pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Karena dengan membaiknya taraf ekonomi masyarakat, ancaman kooptasi elite dalam bentuk politik uang akan dapat dikurangi, dan sekaligus memperluas akses partisipasi politik masyarakat miskin.

• Profil Organisasi JRMK

Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dibentuk di bulan Oktober tahun 2008 di Kampung Marlina Penjaringan Jakarta Utara (Rochayati, 2022). Pembentukan organisasi ini didampingi oleh LSM Urban Poor Consortium (UPC). Pembentukan JRMK salah satunya didorong oleh respon warga kampung dan UPC terhadap maraknya penggusuran oleh pemerintah terhadap kampung-kampung yang dianggap liar dan kumuh, serta terancamnya mata pencaharian warga kampung seperti Pedagang

Kaki Lima (PKL) dan becak di Jakarta. Karena itulah dibentuk organisasi yang terdiri dari jaringan antar kampung di Jakarta dan komunitas marjinal perkotaan lainnya yang menjadi bagian dari pendampingan UPC. Saat ini JRMK memiliki 26 jaringan yang terdiri dari 23 jaringan kampung kota dan 3 komunitas PKL di Jakarta.

Dari awal pendiriannya JRMK selalu bersentuhan dengan aktivitas politik. Bentuk aktivitas politiknya adalah dengan mengkritisi kebijakan negara terutama yang terkait dengan kebijakan terhadap kehidupan masyarakat miskin kota atau berpartisipasi dalam demokrasi elektoral dengan mendukung salah satu calon yang dinilai akomodatif terhadap aspirasi masyarakat miskin kota.

- **Pembangunan Kampung Kota Tahun 2017-2022**

Pada tanggal 8 April 2017 Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, menandatangani kontrak politik dengan JRMK di Pademangan, Jakarta Utara. Isi dari kontrak politik terdiri dari lima poin:

- 1) Perubahan tata ruang perkampungan,
- 2) Legalisasi lahan perkampungan,
- 3) Program hunian terjangkau untuk rakyat miskin,
- 4) Perizinan usaha bagi PKL,
- 5) Bantuan alih profesi bagi tukang becak (www.republika.co.id, n.d.).

Dengan kemenangan Anies-Sandi dalam Pilgub 2017 dan keberhasilan JRMK memenangkan Anies-Sandi di seluruh TPS jaringan kampung JRMK, maka kontrak politik berlanjut. Menindaklanjuti kesepakatan dalam kontrak politik, perwakilan warga kampung, JRMK dan UPC bertemu dengan Anies Baswedan di Balaikota Provinsi DKI Jakarta pada 1 November 2017. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menagih janji dari isi kontrak politik agar menjadi sebuah kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu poin penting dari pertemuan itu adalah usulan agar warga dilibatkan dalam rumusan pembangunan atau penataan kampung. Partipasi warga dalam penataan kampung diharapkan dapat terlibat mulai dari perencanaan hingga pengawasan penataan kampung (Mahmud, 2020).

Usulan ini kemudian diterjemahkan Gubernur DKI Jakarta dengan menetapkan dua peraturan daerah mengenai penataan kampung, yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung Dan Masyarakat yang ditetapkan tanggal 21 Mei 2018, dimana peraturan ini menetapkan mengenai kampung-kampung yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan penataan kampung, termasuk 15 kampung jaringan JRMK ada di dalamnya. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 Gubernur DKI Jakarta juga menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pemukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Pemukiman Terpadu. Dalam Pergub ini diperkenalkan konsep CAP (*Community Action Plan*) dan CIP (*Collaborative Implementation Plan*). CAP merupakan perencanaan pembangunan atau penataan yang menekankan pada proses kolaborasi dan partisipasi dari masyarakat, sedangkan CIP adalah pelaksanaan dari konsep perencanaan yang sudah dimatangkan di tahap CAP. Artinya, masyarakat tak hanya menjadi objek dalam pembangunan, tapi menjadi subjek yang terlibat aktif di dalamnya. Dalam Pergub ini juga didefinisikan mengenai pembangunan kampung yang terdiri dari pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Sepanjang tahun 2018-2022 terdapat realisasi dari pembangunan kampung kota yang berdasarkan kepada dua perangkat hukum tersebut. Realisasi pembangunan itu, antara lain:

- 1) Pembangunan kembali Kampung Akuarium, Kampung Kunir, dalam bentuk Kampung Susun.
- 2) Dibentuknya 26 koperasi di seluruh jaringan JRMK.
- 3) Diberikannya ijin lokasi berusaha bagi komunitas PKL di kawasan wisata Ancol.
- 4) Diijinkannya kembali becak beroperasi secara terbatas.
- 5) Dibangunnya fasilitas umum kampung seperti jembatan, turap, perbaikan jalan, dan lainnya.

- **Gerakan Pembangunan Demokrasi JRMK**

Gerakan demokrasi JRMK adalah cerminan dari pembangunan kampung yang dilakukan JRMK dengan warga. Gerakan ini mencakup gerakan politik dalam pemilu, pembangunan ekonomi

warga, pendidikan dan advokasi kepada warga kampung kota. Tujuan dari gerakan ini diantaranya adalah:

1) Mendorong Partisipasi Aktif Warga Dalam Demokrasi Elektoral

Antara tahun 2017-2022 ada dua momen demokrasi elektoral di tingkat Provinsi DKI Jakarta, yaitu Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019. JRMK mendorong warga agar berpartisipasi aktif pada kedua momen tersebut, namun keterlibatan aktif ini bukan hanya sebatas memilih calon atau pasangan tertentu, tetapi merumuskan bentuk hubungan yang egaliter yang tidak berdasarkan hubungan patron-klien atau transaksi material namun berdasarkan janji-janji politik antara calon pemimpin yang didukung dengan warga yang mendukungnya. Dari konsep ini kemudian dirumuskan agenda politik berupa kontrak politik dengan calon gubernur DKI Jakarta 2017 Anies Baswedan dan konvensi calon legislatif anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019, dimana caleg yang terpilih dari hasil konvensi juga harus melakukan kontrak politik dengan warga kampung kota.

A) Kontrak Politik Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017

Kontrak politik adalah bagian dari pendidikan politik kepada warga. Esensi pendidikan politiknya adalah memberi penyadaran kepada warga untuk menghindari politik uang yang marak beredar. Dengan kontrak politik, warga dan calon pemimpin disatukan oleh kesamaan program yang telah dirumuskan bersama. Kontrak politik juga memberi pendidikan kesetaraan kepada warga kampung terhadap calon pemimpinnya. Jika bergabung dengan partai politik, maka rakyat berpotensi berada di bawah si calon pemimpin, dimana hal ini dapat menghambat proses negosiasi secara sejajar. Secara ringkas kontrak politik tahun 2017 bagi warga kampung kota memiliki fungsi sebagai berikut:

- *Pertama*, kontrak politik sebagai media politik untuk memperjuangkan hak-hak hidup warga kampung kota. Dengan adanya kontrak politik dan berhasil memenangkan calon gubernur yang diusung, eksistensi warga kampung kota sebagai kekuatan politik diakui.
- *Kedua*, kontrak politik sebagai sarana pendidikan politik kepada warga. Nilai-nilai pendidikan politik yang ditanamkan adalah kesadaran agar menempatkan diri secara sejajar dengan para pemimpinnya. Selain itu adalah kesadaran untuk menolak praktek uang yang sangat marak dilakukan terutama yang terjadi pada masyarakat menengah ke bawah (Siswanto, 2020).

B) Konvensi Caleg DPRD DKI Jakarta 2019

Konvensi caleg diadakan pada tanggal 10 Maret 2019. Konvensi caleg dihadiri oleh 6 orang caleg, berasal dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PDI Perjuangan (www.idntimes.com, n.d.). Konvensi caleg memakai pola yang sama dari kontrak politik dengan gubernur DKI Jakarta. Caleg yang terpilih dengan suara terbanyak setelah mereka mempresentasikan gagasan kemudian menandatangani kontrak politik dengan beberapa poin pertimbangan dari kedua belah pihak. Kontrak politik melalui konvensi caleg ini tidak berlanjut karena dua calon yang terpilih dalam konvensi tidak berhasil terpilih sebagai anggota DPRD. Beberapa faktor yang menjadi kendala adalah waktu yang sudah mendesak sehingga kurangnya koordinasi antar kordinator wilayah dan sosialisasi kepada warga menjadi tantangan tersendiri dari kegagalan ini.

Konvensi caleg dalam konteks pendidikan politik warga memiliki tujuan untuk memberi pemahaman kepada warga kampung kota bahwa dasar dari politik adalah gagasan, dan ketika mereka memilih, maka pilihan itu berdasarkan gagasan. Selain itu dengan media konvensi caleg, warga bisa memperjuangkan aspirasinya melalui jalur politik. Bagi para caleg, konvensi ini memberikan pemahaman kepada para caleg untuk dapat memahami kondisi warga kampung kota yang kelak akan mereka perjuangkan (Siswanto, 2020).

2) Pendidikan Bagi Warga Kampung Kota

Dengan adanya Pergub DKI Jakarta No. 90 Tahun 2018 dan Kepgub No. 878 Tahun 2018 mengenai pembangunan kampung, dimana pembangunan kampung turut melibatkan partisipasi

warga, maka agar partisipasi warga dapat berkontribusi secara maksimal, JRMK menggelar kegiatan pendidikan bagi warga kampung kota Jakarta yang dinamakan Sekolah Rakyat. Menurut Sukariawati (Wakil Ketua JRMK) sekolah rakyat adalah kebutuhan warga untuk memahami prosedur dalam pembangunan:

“Ada soal kebutuhan informasi, apa sih itu, apa sih produknya pergub, aturan-aturan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah yang semuanya tidak kita paham. Nah, dari diskusi-diskusi kayak gitu ada ide, oh kita harus panggil nih narasumber yang berkompeten di bidangnya... Jadi ada proses diskusi itu disebut sekolah rakyat... Misalnya kita butuh informasi tentang pertanahan kita panggil dari BPN... Itu jadi agenda satu bulan sekali di JRMK.” (Sukariawati, 2022).

Tema-tema dari Sekolah Rakyat juga berhubungan dengan tema advokasi, sehingga sekolah rakyat diadakan untuk memberi pengetahuan kepada warga agar memahami terhadap agenda-agenda yang diperjuangkannya. Menurut Minawati (Koordinator JRMK):

“Kita mungkin satu bulan sekali demo, tapi kita demo yang terorganisir, kita kalo demo dengan warga wawasan kita kasih dulu, misalnya apa sih gunanya demo-demo? Misalnya demo pengusuran, undang-undang menyangkut hak dasar, hak warga berhak bertempat tinggal, tanah dan air ada disitu. Misalnya pelanggaran HAM, dimana pelanggaran HAM-nya? pasal berapa? jadi kita dilibatkan di situ, jadi setiap kali demo ditanya saya ikutan bukan seperti itu...jadi kita demo sebulan, sebulan dulu ke kampung kasih pengetahuan ke mereka” (Minawati, 2022).

Menurut Alfian pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Pendidikan politik dilakukan secara sadar dan terencana baik formal maupun nonformal dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi agar masyarakat memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya (Sunarso, 2007).

Karena pendidikan politik adalah proses pendidikan secara terus menerus, baik formal dan nonformal, maka pemahaman nilai-nilai demokrasi yang hidup dalam JRMK adalah bagian dari hasil proses pendidikan politik. Salah satu contohnya adalah keberpihakan JRMK terkait isu kesetaraan gender. Dalam mekanisme pengambilan keputusan seperti dalam Pertemuan rutin Akhir Tahun (PAT), setiap jaringan yang hadir diwakili oleh dua anggota yang masing-masing harus terdiri dari laki-laki dan perempuan (Minawati, 2022). Terpilihnya koordinator yang selalu perempuan secara tidak langsung merefleksikan majunya kesetaraan gender di dalam JRMK.

Nilai demokrasi juga tercermin dari proses pengambilan keputusan di kampung-kampung yang melalui mekanisme *bottom up*. Warga kampung kota bersama JRMK dan LSM-LSM pendamping, bersama-sama merumuskan konsep pembangunan atau penataan kampung. Setelah konsep selesai dirumuskan warga hadir dan berdialog langsung dengan pejabat Pemprov DKI memaparkan konsep yang telah dirumuskan bersama.

Secara garis besar pendidikan politik dan hak-hak warga yang ditekankan JRMK kepada warga adalah agar warga kampung kota dapat memahami dan menyadari akan hak-hak hidupnya dan dapat memperjuangkan hak-hak hidupnya melalui jalur politik yang demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu, dalam pendidikan politik warga kampung kota diharapkan dapat memahami kondisi sosial-politik perkotaan dan nasional yang turut mempengaruhi kehidupannya secara langsung. Terakhir, pendidikan politik juga merupakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan *civil society*.

3) Pengembangan Ekonomi Warga

Dari awal pembentukannya, pengembangan ekonomi warga sudah menjadi salah satu fokus JRMK. Saat ini fokus kegiatan pengembangan ekonomi warga adalah koperasi yang telah terbentuk di 26 jaringan JRMK. Koperasi-koperasi yang sudah terbentuk juga telah mengisi kegiatannya dengan berbagai jenis usaha, misalnya berjualan sembako dan tabung gas seperti yang dilakukan koperasi Kampung Blok Eceng, budidaya ikan lele oleh Koperasi Komunitas

Anak Kali Ciliwung (terdiri dari tiga kampung yakni Kampung Lodan, Kampung Tongkol, dan Kampung Krapu), usaha catering seperti yang dilakukan Kampung Akuarium, usaha cuci motor seperti yang dilakukan Kampung Kunir, usaha pembuatan pupuk cair oleh Kampung Muka.

Pendirian koperasi tidak hanya sebatas melakukan gerakan ekonomi secara gotong-royong, namun pendirian koperasi juga merupakan manifestasi dari gerakan pemberdayaan warga. Pemberdayaan masyarakat memuat tiga aspek: (1) Menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat berkembang, (2) Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat, dan (3) Melindungi masyarakat (Faisal, 2020).

Dengan adanya koperasi, suasana lingkungan yang mendorong warga untuk berkembang semakin terbuka. Setelah berdirinya koperasi warga memiliki akses dan jaringan untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Salah satu contohnya seperti di koperasi Kampung Marlina yang memperoleh dana hibah dari Asian Coalition for Housing Rights (ACHR) untuk renovasi rumah warga (Rochayati, 2022). Contoh lainnya adalah koperasi di Kampung Blok Eceng Muara Angke yang mendapatkan bantuan wastafel portable dan sembako dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Adanya bentuk kerjasama dan bantuan hibah ini bisa membantu menjaga daya tahan ekonomi warga.

Adanya koperasi juga semakin meningkatkan potensi warga. Selain terlembaganya semangat bergotong-royong, koperasi juga mengadakan berbagai pelatihan bagi para anggota untuk menambah wawasan pengetahuan perkoperasian dan pengetahuan-pengetahuan teknis lainnya. Seperti pelatihan pembukuan koperasi di Muara Angke dan pelatihan notulensi di Kampung Bayam Tanjung Priok.

Lembaga koperasi juga ditujukan untuk melindungi warga. Dikutip dari kanal youtube resmi JRMK, pendirian koperasi ditujukan sebagai alat untuk membangun jaringan ide, jaringan modal, jaringan informasi, kerjasama, dan sebagai subyek hukum bersama. Koperasi sebagai subyek hukum bersama terkait dengan kepemilikan hak atas tanah, yang tujuannya untuk menghindari godaan para spekulan tanah yang ingin membeli tanah warga. Hak kepemilikan atas tanah ini sudah mulai diproses di beberapa jaringan JRMK, yang salah satunya adalah di Kampung Lodan, Tongkol, Krapu yang berada di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Proses kepemilikan atas tanah di ketiga kampung ini sudah sampai kepada tahap keluarnya surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Koperasi Konsumen Komunitas Anak Kali Ciliwung.

Pembangunan ekonomi warga yang bertumpu pada lembaga koperasi juga mencerminkan upaya pengembangan ekonomi kerakyatan. Menurut Revrisond Baswir sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu struktur dan proses ekonomi yang demokratis dan berkeadilan yang mendorong keikutsertaan rakyat banyak sebagai pemilik modal dan pengendali jalannya roda perekonomian. Sedangkan tujuan dan fungsi dari sistem ekonomi kerakyatan adalah: (1) Untuk membebaskan rakyat dari tindasan para oligarki pemilik modal; (2) Untuk menjadikan rakyat sebagai subyek perekonomian nasional; dan (3) Untuk meningkatkan kegotongroyongan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional (Baswir, 2010).

4) Advokasi Kebijakan

Advokasi JRMK bertujuan untuk perubahan kebijakan tingkat kota dan nasional agar lebih adil kepada mereka yang miskin atau minoritas. Selain perubahan kebijakan, advokasi JRMK juga menasar pada proses pembuatan kebijakan dimana rakyat terlibat dan didengar secara tulus dalam proses pengambilan keputusan. Dalam melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan terkait pemukiman bagi warga kampung kota, JRMK melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- a) Advokasi melawan penggusuran
- b) Advokasi pengusulan konsep alternatif dari komunitas
- c) Advokasi pertanahan
- d) Advokasi pengalokasian anggaran melalui APBD (www.youtube.com, n.d.).

Advokasi-advokasi inilah yang kemudian mendorong Anies Baswedan menetapkan kebijakan penataan kampung dalam bentuk Kepgub DKI Jakarta No. 878 Tahun 2018 Pergub No. 90 Tahun 2018. Dalam Pergub No. 90 Tahun 2018 di dalam Pasal 1, 4, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 ditetapkan program CAP dan CIP yang mengakomodasi peran masyarakat dalam proses penataan kampung. Dana untuk program pembangunan kampung juga diperoleh dari dana APBD

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20. Sedangkan Kepgub No. 878 Tahun 2018 merupakan dasar hukum dalam penataan 21 kampung yang tersebar di wilayah Jakarta, dimana 15-nya adalah bagian dari jaringan kampung JRMK.

Advokasi kepada PKL adalah pendampingan kepada PKL agar mereka memperoleh lahan berdagang yang resmi sehingga mereka merasa aman dalam berdagang bebas dari ancaman penertiban. Salah satu contohnya adalah advokasi kepada pedagang asongan di kawasan wisata Ancol yang tergabung dalam organisasi Komunitas Pedagang Kecil Ancol (KOPEKA) agar mereka menjadi pedagang resmi di kawasan wisata Ancol. Advokasi ini berhasil yang ditandai dengan diterimanya kartu akses masuk ke kawasan wisata Ancol secara gratis.

Selain advokasi kepada PKL, JRMK juga mengadvokasi para penarik becak di Jakarta. Komunitas becak yang bernama Serikat Becak Jakarta (SEBAJA) adalah komunitas becak yang diadvokasi oleh JRMK. Keberadaan becak telah resmi dilarang beroperasi di Jakarta sejak tahun 2007 oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007. Advokasi JRMK kepada komunitas becak di Jakarta adalah menuntut dicabutnya perda tersebut. Saat ini tuntutan pencabutan Perda No. 8 Tahun 2007 memang belum terealisasi. Namun advokasi yang dilakukan tetap membuahkan hasil yakni dengan diijinkannya kembali becak untuk beroperasi secara terbatas di Jakarta. Selain itu adalah dibangunnya tiga halte becak di tiga lokasi, yaitu di Teluk Gong, Kelurahan Penjajalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Eksistensi para pengemudi becak juga semakin diakui, terutama di Kelurahan Penjajalan Jakarta Utara dengan dicetaknya kartu pengemudi becak oleh Lurah Penjajalan sendiri (Saputra, 2022).

Dari urian di atas, secara singkat model pembangunan demokrasi oleh JRMK bisa dinyatakan terdiri dari tiga aspek, yakni: (1) Partisipasi politik secara aktif dalam pemilu nasional dan pilkada DKI Jakarta, (2) Membangun sistem ekonomi kerakyatan, dan (3) Pendidikan politik kepada warga kampung kota. Ketiga aspek ini dibangun dalam skala mikro, yakni kampung kota yang umumnya hanya terdiri dari 1 RT atau beberapa RT. Lebih jelasnya, model tersebut bisa diuraikan sebagaimana Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Model Pembangunan Demokrasi JRMK

Bentuk Gerakan	Bentuk	Tujuan
1. Partisipasi politik secara aktif dalam pemilu nasional dan Pilkada DKI Jakarta	1. Kontrak Politik dengan calon Gubernur DKI Jakarta 2. Konvensi caleg pada pemilu 2019	1. Agar terbentuk pola hubungan kerjasama antara warga dan calon pemimpin secara sejajar. 2. Agar tercipta mekanisme pengawasan warga kepada calon pemimpin yang dipilih. 3. Untuk menghindari politik uang. 4. Agar warga mengetahui visi-misi calon pemimpin yang dipilih.
2. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan	1. Mendirikan koperasi di setiap jaringan JRMK 2. Pemberdayaan dan advokasi kepada PKL 3. Advokasi kepada komunitas becak	1. Meningkatkan perekonomian masyarakat miskin kota 2. Membangun ekonomi warga secara gotong-royong dan demokratis.
3. Pendidikan politik	1. Sekolah rakyat 2. Diskusi, rapat dengan pihak Pemda DKI Jakarta, rapat pengurus JRMK, dan bentuk-bentuk interaksi	1. Menanamkan nilai-nilai politik (kesetaraan gender, demokrasi, kolektivisme). 2. Memberikan pemahaman kepada warga terkait hak-

	formal dan non-formal lainnya.	hak hidupnya sebagai warga negara. 3. Bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan negara dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi baik nasional maupun kota yang menyangkut kehidupan warga langsung.
--	--------------------------------	--

SIMPULAN

JRMK membangun gerakan demokratisasi di tingkat kampung kota, dimana kampung merupakan teritori administratif terkecil. Jaringan kampung di JRMK ada yang secara administratif terdiri dari 1 RT seperti di Kampung Lodan, Krapu, Tongkol, dan Blok Eceng. Pembangunan demokrasi juga dimulai pada tingkat masyarakat akar rumput, yakni kelas menengah ke bawah perkotaan yang terdiri dari para buruh, ojek online, pedagang kaki lima, buruh, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya. Dengan demikian JRMK adalah gerakan akar rumput yang gerakannya dimulai dari administrasi pemerintahan terkecil yakni RT dan kemudian memberikan dampak pada tingkat provinsi.

Pembangunan demokrasi di kampung-kampung mencakup berbagai aspek pembangunan baik itu politik, ekonomi dan sosial-budaya. Dalam aspek politik, pembangunan demokrasi politik tercermin pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pileg 2019 dimana JRMK membangun hubungan yang egaliter antara warga dengan calon pemimpin yang didukung dalam bentuk kontrak politik dan konvensi caleg. Dalam aspek ekonomi tercermin dari pendirian koperasi yang merupakan perwujudan sistem ekonomi kerakyatan, sedangkan dalam aspek sosial-budaya diantaranya adalah internalisasi nilai-nilai demokrasi yang ditanamkan melalui proses pendidikan politik baik secara formal maupun non-formal. Ketiga aspek ini yakni politik, ekonomi, dan sosial-budaya sejalan dengan pandangan AS Hikam yang menyatakan bahwa gerakan *civil society* melalui pemberdayaan masyarakat miskin adalah gerakan arus bawah demokratisasi dimana “kemandirian harus direfleksikan dalam seluruh ruang kehidupan politik, ekonomi dan budaya”.

Model pembangunan demokrasi dari JRMK yakni partisipasi aktif dalam demokrasi elektoral, pengembangan ekonomi kerakyatan, dan pendidikan politik merupakan bentuk antitesis dari kemunduran demokrasi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Partisipasi politik dalam bentuk kontrak politik dan konvensi caleg pada saat pemilu, serta pendidikan politik bagi warga adalah upaya untuk melawan praktek politik uang, budaya patron-klien, dan dominasi kelompok oligarki, sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada warga. Pengembangan ekonomi kerakyatan adalah antitesis dari praktek pembangunan ekonomi liberal yang berorientasi pada pertumbuhan, dimana model pembangunan tersebut telah meningkatkan angka kesenjangan sosial dan berdampak negatif terhadap pembangunan demokrasi.

Model pembangunan demokrasi dari JRMK juga berarti meningkatkan partisipasi warga dalam kehidupan politik. Partisipasi ini dimulai dari keterlibatan warga dalam pelaksanaan pemilu, baik di tingkat nasional dan provinsi hingga ke dalam tahap proses pembangunan kota. Pendidikan politik dan pengembangan ekonomi warga yang ditujukan untuk meningkatnya taraf pendidikan dan ekonomi akan meningkatkan daya tawar dan kualitas partisipasi warga dalam kehidupan politik. Model pembangunan demokrasi dari JRMK, dengan demikian dalam perspektif sistem politik demokrasi adalah upaya membangun proses input yang berkualitas. Kontrak politik dan konvensi caleg adalah bentuk input dukungan, dan advokasi adalah bentuk input tuntutan. Sedangkan pendidikan politik dalam bentuk kegiatan sekolah rakyat dan pengembangan ekonomi kerakyatan adalah bagian dari membangun lingkungan internal atau *intersocietal system* yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Dahl, Robert. (1992). *Demokrasi Ekonomi: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arief, Sritua. (1978). *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan Massal*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- AS Hikam, Muhammad. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Baswir, Revrison. (2010). *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*, Yogyakarta: Delokomotif.
- Diamond, Larry dan Plattner MF. (2000). *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Harris, Syamsudin. (2014). *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Held, David. (2006). *Models of Democracy*, Jakarta: Akbar Tanjung Institute.
- Huntington, Samul P. (1995). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Moleong, Lexy J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Munandar, Haris (ed.). (1994). *"Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia"*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nazir, Mohammad. (1998). *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarki*, Jakarta: Percetakan PT. Gramedia.

Jurnal

- Faisal, Muhammad. (2020). *Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan: Studi Pada Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah di Makassar*, Jurnal Society Vol. 8:2 Tahun 2020.
- Fitriani, Lina Ulfa, L Wiresapta Karyadi, Dwi Setiawan Chaniago, (2019), *Fenomena Politik Uang (Money Politic) Calon Anggota Legislatif di Kabupaten Lombok Barat*, Jurnal Resiprokal Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Fung, Archon dan Erik Olin Wright. (2001). *Deepening Democracy*, Jurnal Utopias Project, Vol. IV.
- Gaffar, Afan. (1991). *Hubungan Patron Client dan Kosekuensinya Terhadap Lahirnya Pengusaha Indonesia: Review Buku Dr. Yahya Muhaimin*, Jurnal UNISIA Vol.10 X1.IV.
- Mahmud, Favian Laksono. (2020). *"Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi DKI Jakarta)"* Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 09 No. 02.
- Rusli, Zaili. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1.

Siswanto Achmad. (2020). “*Pendidikan Politik Berbasis Komunitas (Kasus pada Pendidikan Politik JRMK di Jakarta Utara)*”, Jurnal Hermeneutika Vol.6 No. 1, 2020.

Sunarso. (2007). *Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan*, Jurnal Civics, Vol. 4 No. 2.

Situs Berita Online

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhithia/tidak-mau-salah-pilih-wakil-rakyat-jrmk-gelar-konvensi-caleg>.

<https://medium.com/literasi/gugun-muhammad-tagline-kita-tanah-untuk-penggarap-f9e06912a355>.

<https://politik.rmol.id/read/2016/04/10/242701/ini-isi-kontrak-politik-jakarta-baru-pro-rakyat-miskin-jokowi-yang-dilanggar-ahok>.

<https://www.republika.co.id/berita/oo3lm2257/ini-isi-kontrak-politik-anies-dengan-jaringan-rakyat-miskin-kota>.

<https://www.youtube.com/watch?v=Dy4p05FEBoI>.